

# REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Reformasi  
Birokrasi



**STOP**  
GRATIFIKASI

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi  
Dalam Bentuk Apapun



**BUKU SAKU**



**REFORMASI BIROKRASI**  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2020

## APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN REFORMASI BIROKRASI ?

Secara umum Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi menjadi lebih baik ( Profesional, Bersih, efisien, efektif dan produktif)

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government)



## APAKAH TUJUAN REFORMASI BIROKRASI ?

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

# APAKAH YANG MENJADI DASAR HUKUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ?

3



Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:

1

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan

2

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

## 8

**AREA  
PERUBAHAN**

1

**MANAJEMEN PERUBAHAN**

Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi

2

**PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN**

Meningkatkan Pemerintahan yang bebas KKN

3

**PENGUATAN AKUNTABILITAS**

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

4

**PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

5

**PENGUATAN TATALAKSANA**

Tatalaksana jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip e-government

6

**PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN**

SDM yang berintegritas, Kompeten, Profesional, berkinerja tinggi, netral dan sejahtera

7

**PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
ATAU DEREGULASI KEBIJAKAN**

Regulasi tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

8

**PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan yang Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

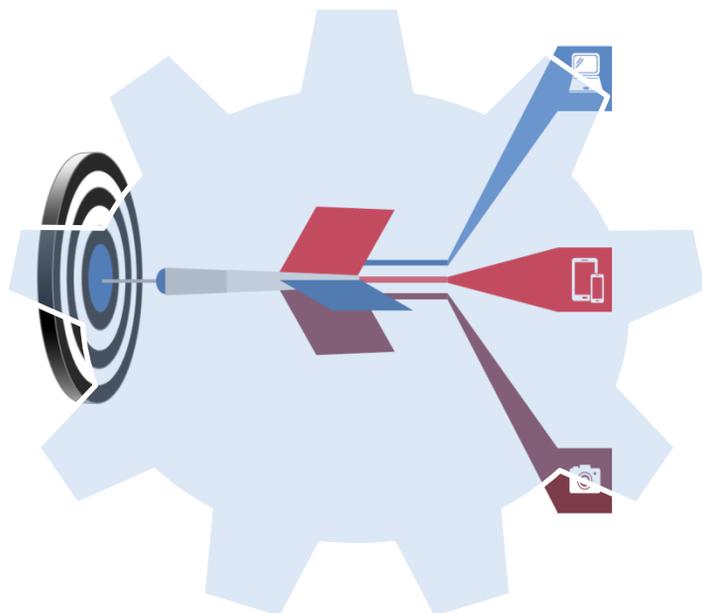


## BPSDM KEMENDAGRI

Berkomitmen akan menyukseskan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

## 3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel serta berkinerja tinggi
2. Pemerintah yang efektif dan Efisien
3. Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas



- predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

## WBK/WBBM

### WILAYAH BEBAS KORUPSI

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar :

1. manajemen perubahan,
2. penataan tatalaksana,
3. penataan sistem manajemen SDM,
4. penguatan pengawasan, dan
5. penguatan akuntabilitas kinerja

### WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar:

1. manajemen perubahan,
2. penataan tatalaksana,
3. penataan sistem manajemen SDM,
4. penguatan pengawasan,
5. penguatan akuntabilitas kinerja, dan
6. penguatan kualitas pelayanan publik

## KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

PENGUNGKIT (60%)

### 8 AREA PERUBAHAN

(Manajemen Perubahan, Harmonisasi Peraturan Perundangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

HASIL (40%)

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2. Nilai Kapasitas Integritas (Survei Internal)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

1. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
2. Opini BPK

Kualitas Pelayanan Publik

- Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

## KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

### 6 AREA PERUBAHAN

(Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)

Presentase penyelesaian TLHP

Kualitas Pelayanan Publik

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

## Langkah Membangun Unit Kerja Menuju WBK/WBBM



1. Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
3. Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
5. Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
6. Apabila Hasil Penilaian Tim Internal, Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi.

## PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN





MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



**BPSDM Kemendagri menjadi INTEGRITY ISLANDS dengan Menerapkan ZI (Kepmendagri No 356-286 Tahun 2020) Tanggal 27 Februari 2020**

**PENANDATANGANAN PIAGAM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020**



Kepmendagri Nomor 800.05-3025 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPSDM Kemendagri

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terakhir dilaksanakan tanggal 17 Juni 2020

Kepmendagri Nomor 800.05-4067 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Budaya Kerja di Lingkungan BPSDM Kemendagri

Kepmendagri Nomor 896-1781 Tahun 2020 tentang Penetapan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kepmendagri Nomor 050-1821 Tahun 2020 tentang Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPSDM Kemendagri Tahun 2020

Dokumen Rencana Kerja Budaya Kerja di Lingkungan BPSDM tanggal 16 Juni 2020

Kepmendagri Nomor 114.05-287 Tahun 2020 tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan BPSDM



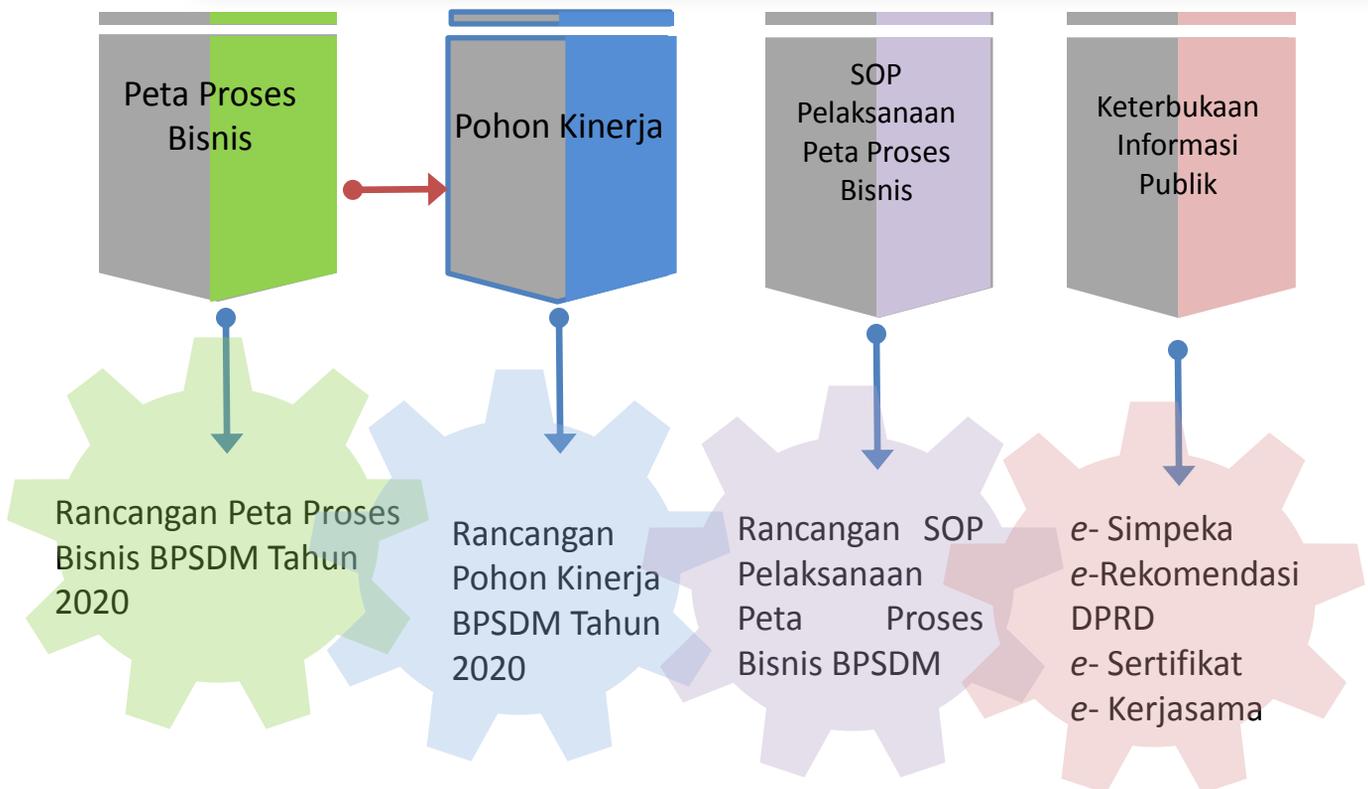
**PROSUNDAGRI**

- 1. Rancangan Permendagri tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pemadam dan Kebakaran**
- 2. Rancangan Permendagri tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional P2UPD**
- 3. Perubahan Permendagri tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda**
- 4. Perubahan Permendagri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri**

**NON PROSUNDAGRI**

- 1. Rancangan Permendagri tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja**
- 2. Perubahan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPSDM**

1. Penyederhanaan Kelembagaan (Penyesuaian Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional) Permenpan 28 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
2. Perubahan Organisasi UPT di lingkungan BPSDM Kemendagri (Revisi Permendagri 84 Tahun 2017) terkait Pemindahan Balai Diklat Satpol PP dan Damkar



12

5

## CAPAIAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN



- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (Permendagri 11 Tahun 2018)
- Pengembangan Kompetensi : Diklat, Workshop, Bimtek, Seminar, Orientasi, FGD, dan Sosialisasi
- Pengembangan Kompetensi Berbasis Elektronik (*e-learning, blended learning, seminar online*)

6

## CAPAIAN KELOMPOK KERJA AKUNTABILITAS KINERJA



01

**Pengelompokkan Jenis Diklat (Struktural dan Fungsional)**

02

**Uji Kompetensi**

02

**Sertifikat**

02

**Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diklat**

02

**Sasaran Kinerja Pegawai**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kepmendagri Nomor 800.05-1758 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* dan Penanganan Benturan Kepentingan

Kepmendagri Nomor 800.05-1508 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pencanangan dan Penandatanganan Piagam Zona Integritas tanggal 18 Maret 2020

Kepmendagri Nomor 800.05-1696 Tahun 2020 tentang Tim Penanganan Gratifikasi di Lingkungan BPSDM

Aplikasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi (SIMPEKA dan e-REKOM)

Kepmendagri 800.05-057 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyandang Disabilitas, ULA, Ruang Menyusui, Parkir khusus wanita.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (Website BPSDM, e-rekomendasi, e-kerjasama)

NO	BUKTI/EVIDENCE
1	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1506 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
2	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1507 Tahun 2020 tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
3	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1508 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
4	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1758 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
5	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 896-1781 Tahun 2020 tentang Penetapan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020



NO	BUKTI/EVIDENCE
6	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-8121 Tahun 2020 tentang Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
7	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1696 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Penanganan Gratifikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
8	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-381 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Program Reformasi Birokrasi dalam rangka Pengumpulan Bukti (Evidence) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
9	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1686 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
10	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1701 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
11	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1794 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

NO	BUKTI/EVIDENCE
12	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3-882 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
13	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-1890 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
14	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Nomor 050-1793 Tahun 2020 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
15	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Tahun 2020
16	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Tahun 2020
17	Piagam Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020



**CAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2020**

**17**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>
<b>1</b>	Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>2</b>	Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi bagi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>3</b>	Rapat Zona Integritas di di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>4</b>	Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Tahun 2020
<b>5</b>	Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Tahun 2020
<b>6</b>	Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar
<b>7</b>	Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>8</b>	Penandatanganan Piagam Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>9</b>	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020
<b>10</b>	Penetapan dan Pengisian PMPZI Tahun 2020 di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Tahun 2020
<b>11</b>	Penetapan dan Pengisian PMPZI Tahun 2020 di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Tahun 2020
<b>12</b>	Sosialisasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Tahun 2020



**HASIL PENILAIAN PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI  
BIROKRASI (PMPRB)  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2020**

NO	KELOMPOK KERJA	NILAI	KETERANGAN
1	Manajemen Perubahan	1,89 (Hijau)	Terpenuhi
2	Penguatan Perundang-Undangan atau Deregulasi Kebijakan	0,75 (Hijau)	Terpenuhi
3	Penguatan Kelembagaan	1,50 (Kuning)	
4	Penguatan Tatalaksana	0,55 (Kuning)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat Renstra sebagai acuan rancangan pembentukan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja dan Unit Kerja.</li> <li>2. Belum terdapat Pohon Kinerja dan SOP pelaksanaan Peta Proses Bisnis.</li> </ol>
5	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1,26 (Hijau)	Terpenuhi
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2,25 (Hijau)	Terpenuhi
7	Penguatan Sistem Pengawasan	1,80 (Hijau)	Terpenuhi
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,98 (Kuning)	

**Keterangan :**

Hijau (baik)

Kuning (cukup)

Merah (kurang baik)

**Catatan:**

1. Pelaksanaan Penginputan PMPRB melalui *website* [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id);
2. Penilaian PMPRB dilakukan oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal Kemendagri;
3. Penilaian dan Penginputan PMPRB Tahun 2020 terakhir dilaksanakan 17 Juni 2020;
4. Hasil penilaian tabel diatas diumumkan pada tanggal 26 Juni 2020 di Inspektorat Jenderal Kemendagri; dan
5. Kekurangan capaian *evidence* dengan nilai yang masih kuning, akan dipenuhi dan diinput sebagai capaian pada Tahun 2021.



**TERIMA KASIH**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2020**